



Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Desa Bendewuta Kecamatan Wonggeduku

Implementation of the Family Hope Program (PKH) Policy in Promoting the Welfare of the Community of Bendewuta Village, Wonggeduku District

Siti Darojah¹, Nartin², Rola Pola Anto³, Hasjad⁴

Universitas Lakidende Unaaha

Email: nartin@unilaki.ac.id

Article Info

Article history :

Received : 26-07-2026

Revised : 28-07-2026

Accepted : 30-07-2026

Published : 01-08-2026

Abstract

This study aims to determine how the policy is implemented and the factors influencing its application. The theory used to analyze the implementation is George C. Edward III's model. This study utilized a qualitative approach with a descriptive research type. Data collection techniques were conducted through observation, interviews, and documentation. The informants in this study consisted of the Head of the Social Affairs Agency, the Village Head, PKH facilitators, and PKH beneficiary families. Data analysis was performed through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results showed that the implementation of the PKH policy in Bendewuta Village has run quite effectively in terms of communication, disposition, and bureaucratic structure. However, there are still inhibiting factors regarding resources, namely the limited number of PKH human resources and some beneficiary data that are not well-targeted.

Keywords: *Policy Implementation, Family Hope Program (PKH), Community Welfare.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan faktor yang berpengaruh dalam penerapannya. Sedangkan Teori yang digunakan untuk menganalisa menggunakan George C. Edward III. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kadis Sosial, Kepala Desa, Pendamping PKH dan masyarakat penerima manfaat PKH. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PKH di Desa Bendewuta telah berjalan cukup efektif ditinjau dari aspek komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun masih ada faktor yang menghambat dari faktor Sumber daya yaitu terbatasnya SDM PKH dan beberapa data Penerima yang tidak tepat sasaran.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan (PKH)*

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan suatu negara. Namun, hingga saat ini masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta kebutuhan dasar lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi standar hidup yang



layak, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia dan ketimpangan sosial di masyarakat.

Dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan, pemerintah memiliki peran penting melalui berbagai kebijakan dan program perlindungan sosial. Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan dan pemberdayaan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan. Salah satu bentuk kebijakan yang dilaksanakan pemerintah adalah program bantuan sosial yang bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat serta meningkatkan akses terhadap layanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan secara bertahap.

Salah satu program pemerintah yang fokus pada penanggulangan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan atau PKH. Program ini merupakan bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Melalui PKH, pemerintah memberikan bantuan tunai kepada keluarga penerima manfaat dengan syarat tertentu, seperti memastikan anak tetap bersekolah, melakukan pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, serta memenuhi kewajiban sosial lainnya. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Implementasi kebijakan PKH menjadi hal yang sangat penting karena keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh perencanaan kebijakan, tetapi juga oleh pelaksanaan di lapangan. Implementasi yang baik dapat mendukung tercapainya tujuan program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Selain membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin, PKH juga berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang lebih produktif dan mandiri di masa mendatang.

Meskipun demikian, pelaksanaan PKH di lapangan masih menghadapi berbagai permasalahan. Beberapa kendala yang sering ditemukan antara lain ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, sumber daya yang terbatas dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang seharusnya layak menerima bantuan namun belum terdata, sementara sebagian penerima bantuan dinilai sudah tidak memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin. Permasalahan tersebut dapat memengaruhi efektivitas program dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai implementasi PKH menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana program ini berjalan secara efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemilihan lokasi dan objek penelitian didasarkan pada adanya fenomena dan permasalahan implementasi PKH yang masih ditemukan di daerah penelitian, sehingga lokasi tersebut dianggap relevan untuk mengkaji pelaksanaan program secara lebih mendalam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor pendukung dan penghambat implementasi PKH serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan pihak terkait dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program bantuan sosial di masa mendatang.



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam mengenai implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai kondisi di lapangan, perilaku pelaksana kebijakan, serta pengalaman masyarakat penerima manfaat PKH.

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif biasanya berupa kata-kata, informasi, pendapat, dan hasil wawancara yang kemudian dianalisis secara mendalam untuk memperoleh pemahaman mengenai suatu fenomena sosial.

Jenis penelitian deskriptif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai implementasi kebijakan PKH. Penelitian deskriptif tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan menggambarkan kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan program, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti dapat mengetahui bagaimana proses implementasi PKH berlangsung, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pendamping sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai implementasi kebijakan PKH di lokasi penelitian.

Fokus Penelitian

Ruang Lingkup dan Fokus penelitian ini diarahkan pada implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang meliputi beberapa aspek penting, yaitu:

1. Implementasi kebijakan PKH di tingkat desa Bendewuta yang akan diteliti menggunakan Teori Edward III.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan PKH di tingkat desa Bendewuta

Informan Penelitian

No	Kategori Informan	Jumlah Informan	Kriteria Informan	Alasan Pemilihan Informan
1	Kadis Sosial	1 orang	Kepala Dinas Aktif	Mengetahui kebijakan dan dukungan Dinas Sosial terhadap pelaksanaan PKH
2	Kepala Desa Bendewuta	1 orang	Kepala desa aktif	Mengetahui kebijakan dan dukungan pemerintah desa terhadap pelaksanaan PKH



No	Kategori Informan	Jumlah Informan	Kriteria Informan	Alasan Pemilihan Informan
1	Kadis Sosial	1 orang	Kepala Dinas Aktif	Mengetahui kebijakan dan dukungan Dinas Sosial terhadap pelaksanaan PKH
3	Pendamping PKH Desa Bendewuta	1 orang	Pendamping PKH aktif	Mengetahui secara langsung proses implementasi, pendampingan, dan kendala PKH
4	Keluarga Penerima Manfaat (KPM PKH)	4 orang	Penerima PKH aktif	Mengetahui manfaat, pemanfaatan, dan dampak PKH terhadap kesejahteraan

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data merupakan bagian penting dalam penelitian karena digunakan sebagai dasar untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut digunakan untuk mendukung proses pengumpulan informasi mengenai implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber utama di lapangan. Data primer dikumpulkan melalui proses penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti sehingga data yang diperoleh bersifat asli dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan PKH. Informan dalam penelitian ini meliputi aparat pemerintah, pendamping PKH, serta masyarakat penerima manfaat program.

Melalui wawancara, peneliti memperoleh informasi mengenai proses implementasi kebijakan PKH, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, serta dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain wawancara, data primer juga diperoleh melalui observasi langsung di lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat penerima manfaat, pelaksanaan program PKH, serta interaksi antara pendamping dan masyarakat. Dengan observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai implementasi kebijakan di lapangan. Data primer sangat penting dalam penelitian kualitatif karena memberikan informasi yang mendalam dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Data ini digunakan sebagai sumber utama dalam menganalisis implementasi kebijakan PKH dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang telah tersedia sebelumnya dan digunakan sebagai pendukung data primer. Data sekunder biasanya diperoleh melalui dokumen, arsip, buku, jurnal, laporan penelitian, peraturan pemerintah, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data primer mengenai implementasi Program



Keluarga Harapan (PKH). Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, data dari dinas sosial, laporan pelaksanaan PKH, buku-buku ilmiah, jurnal penelitian terdahulu, serta peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan program bantuan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Data sekunder membantu peneliti memahami konsep, teori, serta kebijakan yang berkaitan dengan implementasi PKH. Selain itu, data sekunder juga digunakan untuk mengetahui kondisi umum lokasi penelitian, jumlah penerima manfaat PKH, serta informasi lain yang mendukung proses analisis penelitian. Penggunaan data sekunder dalam penelitian sangat penting karena dapat menjadi bahan pembandingan dan pendukung terhadap data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Dengan adanya data primer dan data sekunder, hasil penelitian diharapkan menjadi lebih lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan untuk memperoleh data yang lengkap, akurat, dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian di lapangan. Melalui observasi, peneliti dapat melihat secara nyata kondisi masyarakat, proses pelaksanaan program, serta aktivitas yang berkaitan dengan implementasi kebijakan PKH. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap pelaksanaan PKH di lokasi penelitian, seperti kegiatan pendampingan, penyaluran bantuan sosial, serta kondisi masyarakat penerima manfaat. Peneliti juga mengamati bagaimana interaksi antara pendamping sosial dengan masyarakat serta bagaimana masyarakat memanfaatkan bantuan yang diberikan pemerintah.

Teknik observasi digunakan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai situasi dan kondisi sebenarnya di lapangan. Dengan observasi, data yang diperoleh tidak hanya berdasarkan pendapat informan, tetapi juga berdasarkan hasil pengamatan langsung peneliti terhadap objek penelitian. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dan sistematis dengan mencatat berbagai hal yang berkaitan dengan implementasi PKH, seperti proses pelayanan, kendala pelaksanaan program, serta dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai masalah penelitian. Wawancara digunakan untuk mengetahui pendapat, pengalaman, serta pemahaman informan terkait implementasi kebijakan PKH. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan PKH, seperti



aparatus pemerintah, pendamping PKH, dan masyarakat penerima manfaat program. Melalui wawancara, peneliti memperoleh informasi mengenai proses pelaksanaan program, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, kendala yang dihadapi, serta dampak PKH terhadap kesejahteraan masyarakat.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan pedoman pertanyaan tetapi tetap memberikan kesempatan kepada informan untuk menjelaskan jawaban secara lebih luas. Dengan teknik ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih mendalam dan fleksibel sesuai dengan kondisi di lapangan. Wawancara sangat penting dalam penelitian kualitatif karena dapat membantu peneliti memahami fenomena sosial berdasarkan pengalaman dan pandangan langsung dari informan yang terlibat dalam pelaksanaan program.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen tersebut digunakan sebagai sumber data pendukung untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari berbagai sumber seperti arsip, laporan pelaksanaan PKH, data penerima manfaat, foto kegiatan, peraturan pemerintah, buku, jurnal, dan dokumen lain yang berkaitan dengan implementasi PKH dan kesejahteraan masyarakat.

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis mengenai pelaksanaan program, jumlah penerima manfaat, prosedur pelaksanaan, serta informasi lain yang mendukung penelitian. Selain itu, dokumentasi juga berfungsi sebagai bukti dan penguat terhadap data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Melalui teknik dokumentasi, peneliti dapat memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat disusun secara lebih sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mengolah dan menafsirkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian agar dapat menghasilkan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis data menurut *Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman*. Model analisis ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga data yang diperoleh dianggap lengkap. Menurut *Miles dan Huberman*, analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga tahapan tersebut saling berkaitan dalam proses analisis data penelitian mengenai implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pemusatan perhatian, serta pengelompokan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data-data yang dianggap penting dan relevan dengan fokus penelitian, kemudian membuang data yang tidak berkaitan dengan penelitian.



Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi biasanya sangat banyak dan beragam, sehingga perlu disederhanakan agar lebih mudah dianalisis. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara mengelompokkan informasi yang berkaitan dengan implementasi PKH, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, serta dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui reduksi data, peneliti dapat lebih fokus pada informasi utama yang sesuai dengan tujuan penelitian. Proses ini dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung sehingga data yang diperoleh menjadi lebih terarah dan sistematis.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menyusun dan menampilkan data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang mudah dipahami. Penyajian data bertujuan agar peneliti dapat melihat gambaran secara keseluruhan mengenai hasil penelitian sehingga memudahkan dalam proses analisis dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, bagan, maupun hubungan antar kategori data. Pada penelitian ini, data disajikan dalam bentuk deskripsi atau uraian mengenai implementasi kebijakan PKH, peran pelaksana program, faktor pendukung dan penghambat implementasi, serta kondisi kesejahteraan masyarakat penerima manfaat.

Penyajian data dilakukan secara sistematis agar hubungan antar informasi dapat terlihat dengan jelas. Dengan penyajian data yang baik, peneliti dapat lebih mudah memahami hasil penelitian dan menemukan pola-pola tertentu yang berkaitan dengan implementasi PKH.

Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Pada tahap ini, peneliti memberikan makna dan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis sehingga diperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara pada tahap awal, namun akan semakin jelas dan kuat setelah peneliti memperoleh data tambahan dan melakukan verifikasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Oleh karena itu, proses penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menganalisis seluruh data yang berkaitan dengan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program berdasarkan teori *George C. Edward III*, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Melalui proses penarikan kesimpulan, peneliti dapat mengetahui bagaimana implementasi kebijakan PKH dilaksanakan di lokasi penelitian, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil kesimpulan tersebut kemudian menjadi jawaban atas tujuan penelitian dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan program PKH di masa mendatang.

Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan langkah yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian benar-benar valid, akurat, dan dapat dipercaya. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat penting agar hasil penelitian sesuai dengan kondisi yang



sebenarnya di lapangan. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH), peneliti menggunakan teknik triangulasi.

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu yang berbeda. Dengan menggunakan triangulasi, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat kebenaran yang tinggi dan tidak hanya berasal dari satu sudut pandang saja. Adapun teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan dan mengecek kembali data yang diperoleh dari berbagai sumber informan. Tujuan triangulasi sumber adalah untuk mengetahui kesesuaian informasi yang diberikan oleh masing-masing informan sehingga data yang diperoleh lebih valid dan terpercaya.

Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber, seperti aparat pemerintah, pendamping PKH, dan masyarakat penerima manfaat program. Misalnya, informasi mengenai pelaksanaan program PKH tidak hanya diperoleh dari pendamping sosial, tetapi juga dibandingkan dengan pendapat masyarakat penerima bantuan dan pihak pemerintah terkait. Melalui triangulasi sumber, peneliti dapat mengetahui apakah informasi yang diperoleh memiliki kesamaan atau terdapat perbedaan tertentu. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang berbeda terhadap sumber yang sama. Teknik ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi memiliki kesesuaian. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi mengenai implementasi PKH. Sebagai contoh, informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat penerima manfaat akan dibandingkan dengan hasil observasi di lapangan serta dokumen terkait pelaksanaan program.

Jika data yang diperoleh dari berbagai teknik menunjukkan hasil yang sama, maka data tersebut dianggap lebih valid dan terpercaya. Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan data, peneliti akan melakukan pengecekan kembali untuk memperoleh data yang benar dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Triangulasi teknik membantu peneliti memperoleh data yang lebih lengkap dan mendalam karena setiap teknik pengumpulan data memiliki kelebihan masing-masing dalam menggali informasi penelitian.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda. Teknik ini digunakan karena kondisi dan jawaban informan dapat berubah tergantung pada situasi dan waktu tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dan observasi lebih dari satu kali pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi data yang diperoleh. Misalnya, wawancara dengan



informan dilakukan pada waktu yang berbeda untuk melihat apakah jawaban yang diberikan tetap konsisten atau mengalami perubahan.

Triangulasi waktu dilakukan agar data yang diperoleh lebih stabil dan dapat dipercaya. Dengan melakukan pengecekan data pada waktu yang berbeda, peneliti dapat memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan bukan hanya bersifat sementara. Melalui penggunaan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, diharapkan data dalam penelitian mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dapat teruji keabsahannya sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kebijakan nasional berbentuk bantuan sosial bersyarat yang diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial sejak tahun 2007. Pada awal peluncurannya, program ini dijalankan sebagai proyek percontohan (*pilot project*) di beberapa wilayah spesifik yang memiliki angka kemiskinan ekstrem tinggi, sebelum akhirnya dieksplorasi secara masif ke seluruh penjuru Nusantara, termasuk ke wilayah-wilayah pedesaan.

Masuknya instrumen PKH ke tingkat pedesaan didorong oleh fakta sosiologis bahwa kantong-kantong kemiskinan terbesar dan ketimpangan akses fasilitas dasar mayoritas berada di wilayah desa. Secara kronologis, proses masuk dan diterimanya program PKH di desa-desa secara umum melewati beberapa tahapan historis berikut:

1. Fase Inisiasi dan Pemetaan Data Makro (Penetapan Wilayah)
Kementerian Sosial bekerja sama dengan lembaga penyedia data statistik nasional melakukan pemetaan terhadap wilayah desa yang memiliki indeks pembangunan manusia (IPM) rendah dan beban kemiskinan tinggi. Desa-desa yang memenuhi kriteria dimasukkan ke dalam daftar perluasan wilayah jangkauan PKH secara bertahap dari tahun ke tahun.
2. Proses Sosialisasi Awal dan Koordinasi Lintas Sektoral
Awal mula kehadiran program ini di desa ditandai dengan kedatangan tim fasilitator atau pendamping sosial yang berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa). Pada fase ini, dilakukan sosialisasi intensif untuk mengubah paradigma masyarakat desa mengenai bantuan sosial—bahwa PKH bukan sekadar bantuan tunai gratis, melainkan bantuan bersyarat yang mewajibkan penerimanya (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) untuk berkomitmen di bidang pendidikan dan kesehatan.
3. Penyaringan Data Riil Lapangan (Pertemuan Awal dan Validasi)
Setelah koordinasi birokrasi selesai, pendamping sosial melakukan validasi data terhadap daftar nama warga desa yang keluar dari basis data kemiskinan pusat. Pendamping mendatangi rumah-rumah warga secara langsung (*home visit*) untuk mengecek kecocokan komponen wajib PKH—seperti keberadaan ibu hamil, anak usia sekolah, balita, lansia, atau penyandang disabilitas berat dalam satu kartu keluarga. Warga desa yang lolos verifikasi inilah yang kemudian ditetapkan sebagai KPM resmi generasi pertama di desa tersebut.
4. Pelembagaan Pertemuan Kelompok di Desa.
Sejak diterimanya bantuan tahap pertama, PKH secara resmi mengakar di desa melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil KPM. Kehadiran program ini membawa budaya baru di pedesaan berupa kewajiban mengikuti



Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau *Family Development Session* (FDS) secara rutin setiap bulan, yang dipimpin langsung oleh pendamping PKH.

Melalui rentetan proses historis tersebut, PKH bertransformasi dari sekadar program bantuan pusat menjadi bagian dari urat nadi jaringan pengaman sosial ekonomi yang melekat erat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa hingga hari ini.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bendewuta telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia. Program PKH mulai masuk di Desa Bendewuta pada tahun 2014. Program ini tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dari semua pihak. Kepala Desa yang menjadi pimpinan tertinggi di Desa ikut andil dalam mendukung terlaksananya program ini dengan baik. Kegiatan Sosialisasi dilakukan pada program ini dimulai dari program ini masuk dan berjalan di Desa Bendewuta.

Komunikasi dalam implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan

Komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena berkaitan dengan proses penyampaian informasi, tujuan, dan petunjuk pelaksanaan kebijakan kepada pihak-pihak yang terlibat. Menurut *George C. Edward III*, komunikasi yang efektif akan membantu pelaksana kebijakan memahami apa yang harus dilakukan sehingga kebijakan dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan harus dilakukan secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami. Kejelasan informasi sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika pesan atau instruksi yang diberikan tidak jelas, maka pelaksana kebijakan dapat mengalami kebingungan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, konsistensi komunikasi juga diperlukan agar tidak terjadi perbedaan informasi antara satu pelaksana dengan pelaksana lainnya.

Edward III menjelaskan bahwa komunikasi memiliki tiga unsur penting, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Transmisi berkaitan dengan bagaimana informasi kebijakan disampaikan kepada pelaksana dan masyarakat. Kejelasan berarti informasi yang diberikan harus mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Sementara itu, konsistensi berarti informasi yang disampaikan harus tetap dan tidak berubah-ubah sehingga tidak membingungkan pelaksana kebijakan. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), komunikasi dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat penerima manfaat mengenai tujuan program, syarat penerimaan bantuan, hak dan kewajiban penerima bantuan, serta mekanisme pelaksanaan program. Komunikasi yang baik akan membantu masyarakat memahami program sehingga pelaksanaan PKH dapat berjalan lebih efektif.

Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Konawe Bapak (NS) mengenai komunikasi dalam implementasi Program PKH beliau menyampaikan bahwa:

Berikut wawancara dengan Ibu FK sebagai Penerima Manfaat PKH:

“ Menurut saja sudah bagus jalur komunikasinya, kita kan selalu hadir rapat setiap bulan jadi ada informasi apapun disampaikan dalam rapat ” (Wawancara tanggal 10 Maret 2026).

Dari hasil wawancara dan teori Edward III yang penulis gunakan dalam penelitian ini penulis melihat adanya keselarasan informasi yang dihasilkan antara beberapa informan. bahwa



informasi telah tersampaikan dengan baik, PKH mempunyai Tujuan dan Juknis yang jelas, Informasi dari pusat hingga daerah terjalin konsisten, dan sosialisasi yang jelas.

Sumber Daya dalam implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan

Sumber daya merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut *George C. Edward III*, meskipun kebijakan telah dirancang dengan baik, kebijakan tersebut tidak akan berjalan secara efektif apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan kewenangan.

Sumber daya manusia berkaitan dengan kemampuan dan kompetensi aparat pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang sesuai agar dapat menjalankan tugas secara baik. Selain itu, jumlah pelaksana juga harus mencukupi agar pelaksanaan program dapat dilakukan secara optimal. Anggaran atau dana juga menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa dukungan dana yang memadai, program pemerintah akan sulit dilaksanakan sesuai rencana. Dana diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan operasional, penyediaan fasilitas, serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Selain sumber daya manusia dan dana, fasilitas pendukung juga sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan. Fasilitas tersebut dapat berupa sarana administrasi, teknologi informasi, transportasi, dan peralatan kerja lainnya yang membantu pelaksanaan program. Informasi yang memadai juga penting agar pelaksana kebijakan memahami prosedur dan tujuan kebijakan secara tepat.

Dalam implementasi PKH, sumber daya terlihat dari keberadaan pendamping sosial, dana bantuan sosial, sistem administrasi, dan fasilitas pendukung lainnya. Jika sumber daya yang tersedia tidak memadai, maka pelaksanaan program dapat mengalami berbagai kendala seperti keterlambatan penyaluran bantuan atau kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat.

Berikut adalah kutipan wawancara Penulis dengan Kadis Sosial mengenai Sumber Daya di Program PKH Khususnya Desa Bendewuta:

“Dilihat Dari Rasio Jumlah Pendamping dan KPM dampingannya untuk kecamatan wonggeduku sebenarnya masih kurang, perlu penambahan pendamping, tetapi hal itu tidak mempengaruhi proses penyaluran bansos, tapi dalam pelayanan kepada penerima manfaat pasti kurang optimal karena masing- masing penerima manfaat mempunyai masalah yang berbeda- beda” (Wawancara tanggal 5 Januari 2026)

Disposisi dalam implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor yang berkaitan dengan komitmen, kemauan, kejujuran, dan tanggung jawab aparat pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Menurut *George C. Edward III*, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sikap para pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan. Pelaksana kebijakan yang memiliki sikap positif dan mendukung kebijakan akan berusaha menjalankan program secara maksimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, apabila pelaksana tidak memiliki komitmen atau tidak mendukung kebijakan, maka implementasi kebijakan dapat mengalami hambatan dan tidak berjalan secara efektif.



Disposisi pelaksana juga berkaitan dengan integritas dan profesionalisme aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksana kebijakan harus memiliki sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab agar program dapat berjalan secara adil dan tepat sasaran. Selain itu, pelaksana juga harus memiliki kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan dapat berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaan PKH, sikap pendamping sosial dan aparat pelaksana sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program. Pendamping yang memiliki kepedulian dan komitmen tinggi akan lebih aktif membantu masyarakat penerima manfaat dalam memahami prosedur program, memenuhi kewajiban, dan memanfaatkan bantuan secara tepat. Sebaliknya, apabila pelaksana kurang bertanggung jawab, maka pelaksanaan program dapat menimbulkan berbagai masalah seperti ketidaktepatan sasaran bantuan dan kurang maksimalnya pelayanan.

Struktur Birokrasi dalam implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan

Struktur birokrasi merupakan susunan organisasi dan mekanisme kerja yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut George C. Edward III, struktur birokrasi yang baik akan mempermudah koordinasi, pembagian tugas, dan pengawasan dalam implementasi kebijakan. Sebaliknya, struktur birokrasi yang terlalu rumit dapat menghambat pelaksanaan kebijakan karena proses administrasi menjadi lambat dan tidak efisien. Struktur birokrasi berkaitan dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas di antara pelaksana kebijakan. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, setiap aparat pelaksana dapat memahami peran dan kewajibannya masing-masing sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara terarah. Selain itu, struktur birokrasi juga berkaitan dengan prosedur operasional standar atau Standard Operating Procedure (SOP). SOP diperlukan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan agar proses pelaksanaan berjalan secara teratur dan sesuai aturan yang berlaku. Adanya SOP membantu mengurangi kesalahan dan meningkatkan efektivitas kerja aparat pelaksana.

Koordinasi antar lembaga juga menjadi bagian penting dalam struktur birokrasi. Dalam implementasi kebijakan, sering kali terdapat beberapa instansi yang terlibat sehingga diperlukan kerja sama dan koordinasi yang baik agar pelaksanaan program berjalan lancar. Dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), struktur birokrasi melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas sosial, serta pendamping sosial di lapangan. Koordinasi yang baik antar pihak sangat diperlukan agar proses pendataan, penyaluran bantuan, pendampingan, dan pengawasan program dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Dalam struktur birokrasi PKH di Desa Bendewuta, mekanisme koordinasi dilakukan secara vertikal dan horizontal. Koordinasi vertikal terjadi antara pendamping PKH dengan koordinator PKH di tingkat kecamatan dan dinas sosial kabupaten.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang penulis dapatkan berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan dalam Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Desa Bendewuta adalah sebagai berikut:

1. Terkait Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bendewuta secara umum telah berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Terciptanya Komunikasi yang efektif yang mendukung pelaksanaan PKH sesuai tujuan, adanya sumber



daya yang memadai memungkinkan pelaksanaan PKH berjalan optimal, sikap positif pelaksana yang mendorong implementasi PKH berjalan sesuai aturan, dan struktur birokrasi yang baik memudahkan koordinasi dan pengawasan program.

2. Terkait Faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Bendewuta bahwa masih ada kendala dalam pelaksanaannya yaitu Terbatasnya jumlah pendamping dan Data yang belum sepenuhnya terbarukan membuat pelaksanaan PKH belum sepenuhnya optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Samudra, A., Azhari, A., & et al. (2023). Implementasi Kebijakan Publik & Evidence-Base Policy. Samudra Biru. UMJ Repository
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024*. Jakarta: BPS RI. Akses di bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (30 Desember 2025). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2025*. Diakses pada 5 Februari 2026.
- Fabian, M. (2022). *A Theory of Subjective Well-Being*. Oxford University Press.
- Kementerian Sosial RI. (2024). *Laporan Tahunan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018). *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Kementerian Sosial RI.pdf.
- Putri Regina, E. A. Z., & Prasetyawan, I. (2025). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Model, dan Evaluasi. Deepublish (Indonesia). Deepublish Store
- Ramadhan, S. (2024). Implementasi Kebijakan Publik: Buku Ajar. PT Media Penerbit Indonesia. Media Penerbit Indonesia Repository
- Sen, A. (2020). *Development as Freedom* (Updated Edition). Oxford University Press.
- Suharto, E. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.pdf.
- Suharto, E. (2014). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik: Peran Pekerjaan Sosial dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Alfabeta.pdf.
- Uswatun Khasanah. (2024). Kebijakan Publik Teori dan Implementasi. Nafal Global Nusantara. Nafal Global Nusantara
- Wahyuni, E. N. (2023). Kesejahteraan Subyektif Mahasiswa. Deepublish.
- World Bank. (2018). *Program Keluarga Harapan (PKH) Indonesia: Improving Welfare through Conditional Cash Transfers*. Washington D.C.: The World Bank Group.pdf